

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis)*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Gustian Djuanda, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Habib Adjie, *Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekt Notaris dan PPAT)*, 2016.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2010.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999.
- Ronny Hamidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1975.
- Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights (Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak)*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69./PUU-XIII/2015 atas Perubahan UU Perkawinan terkait Perjanjian Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan Pembayaran Masa.

### **Jurnal Hukum**

Biatar Pandapotan Purba, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan*, Media Akuntansi Perpajakan, Volume 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2016.

Febriana Wirika Putri, *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya, 2016.

### **Skripsi dan Tesis**

Ane Fany Novitasari, *Tanggung Jawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016).

Lia Nur Khasanah, *Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali)*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Sachrizal Niqie Supriyono, *Keterlibatan Perseroan Terbatas Versluis Dalam Transaksi Tanah Bekas Hak Barat (Studi di Wilayah Hukum Kota Batu)*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.

Shella Fatimah, *Analisis Yuridis Pertimbangan dan Implikasi Hukum Penetapan Pengadilan Nomor 459/Pdt/PN.JKT.TMR tentang Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan*, Tesis tidak diterbitkan, Malang Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.

### **Makalah**

Habib Adjie, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Makalah dibagikan pada Seminar dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Serta Permasalahan Kewarisan, Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran dan Dunia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Surabaya, 17 Desember 2016.

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Makalah dibagikan pada Seminar dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Serta Permasalahan Kewarisan, Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran dan Dunia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Surabaya, 17 Desember 2016.

### **Internet**

Tim Redaksi Ortax, *Pengawasan Pembayaran Masa PPh 21*, <http://www.ortax.org> ,diakses pada 25 Juli 2017, pukul 22.15.

Gito Adiputro Wiratno, *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah*, <http://www.wartaekonomi.co.id> , diakses pada 26 Juli 2017, pukul 23.35.